

PENINGKATAN PERAN *GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER* (GCIO) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

Frezy Albertus Silaban¹, Mohammad Rezza Fahlevvi²

NPP. 31.0175

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: 31.0318@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Mohammad Rezza Fahlevvi, S.Kom, M.Cs

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In the implementation of government GCIO in Batam City, there are some common problems encountered, such as decision making is not supported by information data, information has not been integrated, information and context have not been prioritized, and there is no information area coordinator in the agency. This study aims to analyze the improvement of the role of Government Chief Information Officer (GCIO) at the Communication and Information Technology Department of Batam City, especially on supporters and challenges. **Purpose:** The reason why researcher doing this research is to find out that role of Government Chief Information Officer (GCIO) in Batam City has well done or even worst, also to describe opportunity and weakness about role of Government Chief Information Officer (GCIO). **Method:** This research using qualitative descriptive as main research method with role Government Chief Information Officer (GCIO) theory as Grand Theory (Supangkat, 2008). In case of this research, data collected by doing interview, observe, and documentation from competent informant (purposive sampling). After that, those datas had to analyze by data reduction, data presentation, and conclusion. **Result:** That who roled as Government Chief Information Officer (GCIO) have doing well on his duty and responsibilities according to Batam City's Mayor Regulation No. 40/2021. **Conclusion:** Role of Government Chief Information Officer (GCIO) of Communication and Informatics Department of Batam City well done. However, there is many ways to improvement space had to do especially according as in Strategic Plan of Batam City 2021-2026 about regulation and facilities.

Keywords: Improvement, Role, GCIO, Batam City.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penerapan GCIO pemerintah di Kota Batam, terdapat beberapa masalah yang umum ditemui, seperti pengambilan keputusan tidak didukung oleh data informasi, informasi belum terintegrasi, informasi dan konteks belum diprioritaskan, dan belum adanya koordinator bidang informasi di instansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, terutama pada faktor pendukung dan tantangannya. **Tujuan:** Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Kota Batam sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya, serta mendeskripsikan peluang dan kelemahan dari peran *Government Chief Information Officer* (GCIO). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian utama dengan teori peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagai *Grand Theory* (Supangkat, 2008). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang berkompeten (*purposive sampling*). Setelah itu, data-data tersebut dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Bahwa yang berperan sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Batam No. 40/2021. **Kesimpulan:** Peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah terlaksana dengan baik, adapun peluang dan tantangan yang harus diperhatikan lebih lanjut, terutama pada peraturan perundang-undangan dan fasilitas.

Kata Kunci: Peningkatan, Peran, GCIO, Kota Batam.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia teknologi hari ini sudah menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, dimana sekarang hampir semua kalangan memiliki gadget yang setiap saat bisa digunakan bahkan sudah menjadi kebiasaan yang sangat kuat. Sebanyak 167 juta orang jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada bulan Januari 2023 (Nugroho, 2023). Dengan Internet, semua informasi menjadi mudah diakses, terlepas dari aspek negatif dari jenis informasi tersebut. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat dapat membuat komunikasi antara satu tempat dengan tempat lain menjadi lebih mudah (Rukayat, 2017).

Teknologi informasi harus berfungsi sama bagi semua penggunanya, termasuk organisasi pemerintah di tingkat daerah seperti kelurahan dan kantor pelayanan. Untuk membantu hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menawarkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi National *Government Chief Information Officer* (GCIO) (Kosala et. al., 2018). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pejabat dalam mengelola teknologi informasi dan tata kelola informasi di lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, diharapkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di daerah seperti Kota Batam dapat meningkat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai berlaku efektif dua tahun setelah diundangkan pada 30 April 2008. Berdasarkan undang-undang ini, setiap lembaga pemerintah wajib memberikan akses terbuka atas semua permintaan informasi publik, kecuali

untuk informasi tertentu yang dikecualikan. Tujuannya adalah agar warga negara dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan negara, pengawasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan publik. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga untuk mengakses informasi publik, data yang tersedia secara terbuka setiap saat, serta informasi mengenai jenis lembaga pemerintah dan unit-unitnya, termasuk pengumuman berkala yang dikeluarkan (Anjani, 2023).

Terkait penerapan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Kota Batam, terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi, antara lain: pengambilan keputusan kurang didukung oleh data informasi, informasi belum terintegrasi, informasi dan konteks belum menjadi prioritas, serta belum adanya koordinator wilayah informasi di instansi. Agar masyarakat dapat mewujudkan dan mempersepsikan layanan informasi publik yang berkualitas, maka teknologi informasi komunikasi pada institusi pemerintah harus berfungsi secara maksimal, terintegrasi, dan memiliki arah yang lebih jelas (Dunn, 2003). Hal ini memperjelas peran Pejabat Informasi Pemerintah atau *Government Chief Information Officer* (GCIO).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Batam menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya dukungan data dalam pengambilan keputusan, belum terintegrasinya sistem informasi, rendahnya prioritas terhadap informasi dan konteksnya, serta ketiadaan koordinator informasi di tingkat instansi. Untuk mencapai persepsi dan realisasi layanan informasi publik yang bermutu, diperlukan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di lembaga pemerintah. Sistem tersebut harus terintegrasi dan memiliki arah yang jelas. Kondisi ini menekankan pentingnya peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) atau Pejabat Informasi Pemerintah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk menarik kesamaan dan kemudian mengidentifikasi gagasan-gagasan baru untuk penelitian lanjutan. Lebih jauh, penelitian sebelumnya menunjukkan keunikan penelitian yang akan dilakukan dan membantu menempatkannya dalam konteks yang tepat.

Pertama, penelitian oleh Pertiwi dan Purnomo berjudul *Peran Government Chief Information Officer (GCIO) dalam Pelayanan Informasi Publik (Studi Deskriptif di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan DIY)*. Menggunakan teori *E-Government* dan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran GCIO belum dilaksanakan secara maksimal karena tenaga kerja yang dimiliki belum mempunyai kemampuan yang memadai dan jumlahnya kurang mencukupi (Pertiwi & Purnomo, 2018).

Kedua, penelitian oleh Harimurti berjudul *Urgensi GCIO untuk Mewujudkan Manajemen Informasi Berbasis Connected Government di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Menggunakan teori *E-Government* dan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan pengelolaan informasi pada Pemerintah Daerah DIY belum berjalan efisien karena kurangnya kepemimpinan manajemen tingkat atas dan forum terpadu dalam pengelolaan operasional di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY memerlukan model pengelolaan informasi yang efisien berbasis GCIO.

Ketiga, penelitian oleh Nugroho berjudul *Pemodelan Kedudukan Government Chief Information Officer Indonesia* Menggunakan metodologi kualitatif. Hasilnya adalah usulan kerangka kerja bagi peran GCIO di pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keempat, penelitian oleh Putranto, Nugroho & Winarno berjudul *Government Chief Information Officer: Analisis Peran Di Pemerintahan Indonesia*. Menggunakan teori efektivitas kebijakan pemerintah dan metode kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa GCIO Indonesia perlu menjalankan tujuh fungsi utama dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di pemerintahan.

Kelima, penelitian oleh Nurunnisa berjudul *Analisis Peran Government Chief Information Officer (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karimun*. Menggunakan teori peran GCIO dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan peran GCIO sudah terlaksana dengan baik namun perlu dimaksimalkan karena adanya tantangan seperti kemampuan SDM, sosialisasi/pelatihan, dan peran pendamping PPID yang masih kurang aktif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti telah melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan pada lingkungan Pemerintahan Kota Batam, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Penelitian ini berfokus pada implementasi peran *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menggunakan 6 aspek pada peran GCIO sebagaimana disebutkan dalam teori *Government Chief Information Officer* oleh Supangkat (2018) serta mengidentifikasi tantangan dan peluang sehingga dapat mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan peran *Government Chief Information Officer (GCIO)*, mengeksplorasi peluang dan tantangan serta upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada peran *Government Chief Information Officer (GCIO)* dengan acuan teori GCIO dari Supangkat (2018).

II. METODE

Metode penelitian merupakan pola atau petunjuk tentang cara penulis mengumpulkan dan mengevaluasi data yang diperlukan untuk menyelidiki masalah penelitian utama (Bungin, 2020). Pendekatan penelitian yang dipilih harus relevan dengan permasalahan yang dipertimbangkan. Strategi ini dirancang untuk memudahkan penyelidikan penulis terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi teknik penelitian kualitatif. Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa berbagai jenis desain penelitian untuk penelitian kualitatif dapat beradaptasi dengan sifat perkembangan bidang tersebut, yang ditandai dengan kejadian yang muncul secara alami dan mengikuti hukum alam. Penelitian partisipatif, atau penelitian kualitatif, memiliki ciri desain penelitian yang fleksibel dan dapat diubah untuk mengakomodasi rencana atau realitas lokal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Moleong, 2018). Pada metode kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2017), diperlukan informan atau sumber data yang berkaitan langsung dan berkompeten pada objek penelitian (*purposive sampling*) yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, Kepala Bidang Kehumasan dan Informasi, serta ASN pada bidang-bidang tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai teori peran *Government Chief Information Officer* dari Supangkat (2018) yaitu dengan mendeskripsikan keadaan di lapangan berdasarkan 6 aspek, yakni: Memimpin, Antispasi, Strategi, Mengorganisasi, Penyediaan, dan Pengukuran Pengembangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Government Chief Information Officer (GCIO) menjadi sebuah peran yang strategis dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan digital. Kompetensi pada peran ini menjadi salah satu kontributor yang mewujudkan keberhasilan program SPBE, *smart city*, dan *Smart Province* yang telah direncanakan. Bahwasannya peneliti mendapati pejabat yang memiliki tanggung jawab sebagai GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika karena jabatan ini bertanggung jawab atas pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan *e-government* dibantu dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian serta Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-government*. Oleh karena itu perannya tersebut sebagai inti dari GCIO yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan sistem pemerintahan digital sesuai tujuan organisasi/instansi pada layanan informasi publik.

3.1.1 Memimpin

Seorang *Government Chief Information Officer* (GCIO) dalam peranannya sebagai pemimpin mampu merumuskan visi misinya untuk dijadikan sebagai tujuan. Dalam menentukan tujuan tersebut guna keberhasilan organisasi, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang profesional dalam hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sesuai dengan tugas fungsi serta tanggung jawabnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus GCIO adalah pemimpin yang dapat merumuskan visi serta menetapkan tujuan dan sasaran untuk instansi yang diharapkan dapat menjadi penyedia layanan dan sarana IT sesuai kebutuhan, selain itu menempatkan sumber daya manusia (pegawai) yang berkompeten dalam bidangnya. Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Bapak Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si terkait pemimpin pada era transformasi digital dengan pertanyaan:

Sejauh mana pemimpin menunjukkan kemampuannya dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan regulasi yang berlaku terutama dalam hal transformasi digital?, beliau menyatakan:

“Tentunya sebagai pemimpin haruslah juga memiliki kemampuan sebagai leader untuk mengayomi bawahan maupun kemampuan dalam menentukan kebijakan serta mengambil keputusan. Tambahan juga melihat zaman yang sudah serba digital ini tentunya harus dapat menguasai teknologi yang ada, serta dapat beradaptasi akan canggihnya teknologi yang selalu terus maju, sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan mudah digunakan”.

Dari keterangan yang didapati bahwa GCIO pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sudah memiliki peran pemimpin yang baik. Hal itu terlihat pada hasil bahwa sebagai GCIO ia harus selalu mengembangkan kompetensi beserta kemampuannya menjadi pemimpin yang aktif seiring perkembangan zaman.

3.1.2 Antisipasi

Sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) tentunya harus selalu memiliki langkah antisipasi, baik itu dalam menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta selalu berusaha dapat memberikan layanan informasi dengan cepat dan mudah. Keamanan informasi sendiri bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas, ketersediaan dan kerahasiaan dari pengelola informasi yang masih sering dikesampingkan dari pengelolaan informasi. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan dengan pertanyaan:

Sejauh mana GCIO dalam menunjukkan komitmen dan upaya dalam mencegah tindakan penyalahgunaan informasi?, beliau menjawab:

“Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kami memiliki wewenang dalam menyusun dan menetapkan jenis informasi, rahasia atau tidak, karena itu setiap informasi yang akan disebar kami uji dulu hingga ditetapkan status informasinya. Kami juga diberi amanah oleh Pimpinan untuk tidak membuat kesalahan dalam klasifikasi informasi ini, oleh karena itu kualitas dari PPID sebagai pengelola informasi sangat berpengaruh, dimana pemahaman serta kemampuan para staff PPID menjadi hal penting yang nantinya akan menentukan kebijakan selanjutnya”.

Hasil wawancara di atas bahwa GCIO Kota Batam sudah melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku terutama dalam mengolah dan menyiapkan informasi yang dikecualikan, tentunya GCIO Kota Batam sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dengan baik. Dalam menuliskan informasi, meminta informasi kepada OPD yang bersangkutan, dan untuk informasi yang dikecualikan sudah terdata dan terjaga kerahasiaannya.

3.1.3 Strategi

Sebagai GCIO, PPID Kota Batam sendiri sudah menawarkan berbagai macam kemudahan dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi komunikasi yang ada. Strategi yang dilakukan PPID Kota Batam dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik ialah penyediaan akses transaksi melalui portal website dengan maksud mengembangkan teknologi informasi dalam penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan keberatan, recording hasil transaksi, serta dokumentasi lainnya.

Penyediaan portal ini menjadi rencana strategis oleh PPID Kota Batam yang sesuai dengan misi organisasi yaitu membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi melalui teknologi.



Gambar 1. Halaman Utama Situs PPID Kota Batam

Tampilan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Batam pada Gambar di atas memiliki tampilan yang jelas dan mudah dimengerti dalam penggunaannya, serta memiliki desain website yang standar dengan website PPID Kota/Kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi di PPID Kota Batam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, karena tidak ada pengecualian bagi organisasi pemerintah dalam memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan

memiliki kompetensi yang bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bapak Tyas Satria Manggala, S.STP dengan pertanyaan:

Sejauh mana organisasi menunjukkan komitmen dan upaya dalam menyediakan media informasi dan mengembangkan SDM TIK untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi?, beliau menyatakan:

“Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten masih terus kami lakukan, karena hal itu akan mempengaruhi berjalannya pengelolaan informasi di lingkup PPID Utama maupun PPID Pembantu. Karena sampai saat ini yang masih menjadi masalah yaitu OPD sebagai PPID Pembantu yang belum mengerti akan tugas dan fungsinya sendiri, ya itu karena memang sosialisasi dan pelatihan mengenai pelayanan informasi publik belum berjalan secara optimal”.

Tujuan dari dilakukannya kegiatan pelatihan dilingkup PPID Kota Batam tidak lain yaitu untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

3.1.4 Mengorganisasi

Mengorganisasikan yang dimaksud ialah bagaimana seorang GCIO dapat menentukan serta menjamin tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai sehingga mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. GCIO dinilai sudah melakukan pengorganisasian yang baik. Baik itu dalam membuat kebijakan dan menentukan setiap pelaksana kebijakan tersebut. Itu dibuktikan dengan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 – 2026 berdasarkan target rencana strategis periode sebelumnya yang berkaitan dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	100%
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	20%
3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	40%
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	0%	56%
5	Jumlah Layanan Hubungan Media	-	-	-	50 Media	50 Media	68 Media	105 Media	136%	210%
6	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	-	-	0 Aplikasi	20 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0%	0%
7	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%
8	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%
9	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%

Gambar 2. Indikator Kinerja Pelayanan

Pada pencapaian kinerja diatas sudah berjalan semua dan bahkan ada yang melebihi dari target. Pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian indikator kinerja pelayanan yang dicapai adalah jumlah subdomain yang telah dimanfaatkan, tower telekomunikasi radio, jumlah titik hotspot internet di tempat umum, jumlah media massa yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi, jumlah media pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan untuk penyebaran informasi, jumlah pelaksanaan media tatap muka/interpersonal antara pemerintah dengan masyarakat, jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik, jumlah Informasi yang

disebarkan melalui website diskombatam.go.id maupun ppid.batam.go.id, jumlah PPID pembantu yang aktif menyebarkan informasi publik, dan jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola.

3.1.5 Penyediaan

Sebagai PPID yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyediaan informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat GCIO sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dengan menyediakan portal website PPID Kota Batam sebagai bentuk untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bapak Tyas Satria Manggala, S.STP, ia mengatakan bahwa:

“Saat ini memang sudah sangat dimudahkan ya untuk membuat permohonan informasi yaitu menggunakan website, namun tentunya kami masih menyediakan pelayanan secara tatap muka jika masyarakat memiliki keterbatasan dalam melakukan permohonan secara online”.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan sejauh mana GCIO menunjukkan komitmen dan upaya dalam menyediakan layanan online dan mengumpulkan informasi untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi?, beliau menyatakan:

“Untuk penyediaan bahan informasi sendiri kami melakukan pengumpulan yang berasal dari OPD sebagai PPID Pembantu. Namun pada saat waktu pengumpulan informasi masih ada beberapa OPD yang lambat atau bahkan tidak mengirimkan respon apapun jika kami mintai informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat, entah mereka kurang informasi atau juga pegawai yang menjadi admin tidak mengerti akan informasi yang dibutuhkan”.

Hasil wawancara diatas terlihat bahwa PPID Kota Batam dalam penyediaan informasi diperoleh dari PPID Pembantu yang mana dalam hal ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah. Namun masih saja ada OPD yang mengesampingkan tugas dan tanggungjawabnya itu, terlihat masih ada yang lambat dalam merespon jika dimintai informasi dan itu menjadi penghambat dan membuat pelayanan informasi publik menjadi tidak efektif serta tidak efisien.

3.1.6 Pengukuran dan Pengembangan

Untuk mengembangkan sistem informasi yang sudah berjalan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, GCIO harus mengembangkan kemampuan maupun pengaruhnya dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada proyek sistem informasi namun memahami sifat dan penggunaan serta pengaruh yang dimilikinya dalam lingkup organisasi. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yakni Bapak Tyas Satria Manggala, S.STP dengan pertanyaan:

Sejauh mana organisasi menunjukkan komitmen dan upaya dalam mengevaluasi kinerja dan fasilitas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi?, ia menjawab bahwa:

“Infrastrukturnya menggunakan jasa pihak ketiga, alasan belum mempunyai tenaga ahli. Namun dalam pembangunan data center sudah hampir 90%. Data center menjadi tempat untuk penyimpanan dan pengolahan data Kota Batam dan dengan adanya data center ini diharapkan aplikasi bisa saling terintegrasi, dandapat membackup data sehingga apabila datadata yang ada hilang diskominfo masih memiliki salinannya dipusat data”.

3.2 Peluang dan Tantangan dalam Peningkatan Peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Dalam hal inisiatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan informasi publik, GCIO (*Government Chief Information Officer*) adalah pemain kunci utamanya. Keadaan eksternal yang dihadapi oleh perangkat daerah terdiri dari peluang dan tantangan. Faktor eksternal yang positif dapat dianggap sebagai peluang, sedangkan faktor eksternal yang negatif dapat dipandang sebagai tantangan. Kondisi eksternal tersebut berjalan seiring dengan permasalahan dan faktor penentu keberhasilan RPJMD (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*) Kota Batam Bab IV Tahun 2021–2026. Hingga tahun 2026 akan diawasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membahas peluang dan tantangan yang akan timbul dalam mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Berikut adalah daftar peluang dan tantangan secara berurutan:

No	Tantangan	Peluang
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya penerapan e-government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur PP No. 95 Tahun 2018	Mengoptimalkan penerapan Perwako No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemkot Batam
2	Belum ada rencana induk arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Batam	Menyusun rencana induk, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Batam
3	Kurangnya jumlah SDM pengelola TIK berkualitas	Rekrutmen SDM pengelola TIK yang berkualitas
4	Diseminasi informasi publik secara digital belum optimal	Mengoptimalkan peran OPD dalam diseminasi informasi publik
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum optimal dalam partisipasi diseminasi informasi	Pembinaan dan pelatihan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6	Penyerapan opini dan aspirasi yang belum optimal	Mengoptimalkan peran dan sosialisasi penggunaan SPAN Laporan
7	Sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam belum merata	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam

Tabel 1. Peluang dan Tantangan

Peningkatan peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Batam dalam implementasinya membutuhkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mumpuni untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

3.3 Upaya Dilakukan oleh *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Untuk memfasilitasi pertumbuhan *e-Government* di Indonesia, pemerintah harus memperkuat institusinya dan menugaskan *Government Chief Information Officer* (GCIO) untuk mengambil peran penting. Langkah pertama adalah melakukan standarisasi peran GCIO dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini dicapai dengan menentukan tanggung jawab utama GCIO untuk Indonesia, yang mengarah pada identifikasi tujuh tanggung jawab utama GCIO.

Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government DISKOMINFO Kota Batam, Tyas Satria Manggala, S.STP, menyatakan bahwa penugasan GCIO merupakan salah satu solusi untuk memajukan *e-Government* dari segi dimensi kelembagaan. Namun, di DISKOMINFO Kota Batam sedang

menunggu regulasi terkait GCIO untuk perkembangan selanjutnya, meskipun pada aplikasinya, GCIO ini sudah terimplementasikan pada berjalannya pada program *e-government*. Sehingga disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan GCIO DISKOMINFO Kota Batam untuk meningkatkan perannya lebih berfokus pada evaluasi regulasi yang berlaku ke depannya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) telah berkembang dari konsep teoretis menjadi implementasi nyata di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2020. Perbandingan antara penelitian terdahulu dan kondisi saat ini menunjukkan pergeseran fokus dari potensi penerapan ke analisis dampak dan efektivitas. Metodologi penelitian kini lebih mengandalkan observasi langsung dan wawancara, memungkinkan identifikasi tantangan nyata dan rekomendasi praktis.

Implementasi GCIO di Batam membuka peluang untuk mengkaji dampaknya terhadap tata kelola TI pemerintahan, strategi *e-government*, dan inisiatif *smart city*. Penelitian dapat menganalisis tantangan spesifik dalam implementasi, mengusulkan metode evaluasi kinerja yang sesuai, serta mengidentifikasi peluang pengembangan peran GCIO di masa depan.

Analisis perbandingan ini memberikan wawasan berharga tentang transformasi GCIO dari teori ke praktik, yang dapat menjadi model pembelajaran bagi implementasi di daerah lain di Indonesia. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan TI pemerintahan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Perbandingan atau komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah, pada penelitian sebelumnya berfokus pada konsep GCIO semata, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada konsep GCIO ditambah dengan peluang dan tantangan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran GCIO di Kota Batam. Adapun perbandingan lainnya seperti, penelitian terdahulu hanya berpatokan pada konsep GCIO secara umum, sedangkan pada penelitian ini acuannya ditambah dengan regulasi Peraturan Walikota Batam No. 40 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2021 sehingga peran GCIO lebih spesifik terhadap keperluan atau kondisi di lingkungan pemerintahan Kota Batam.

IV. KESIMPULAN

1. Fungsi *Government Chief Information Officer* (GCIO) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dari sisi peran dan tugas penting peran memimpin GCIO sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan peraturan Walikota Batam nomor 40 tahun 2021, dalam hal antisipasi sudah menjalankan prosedur informasi publik di Kota Batam, strategi sudah berjalan walaupun belum optimal, dalam mengorganisasi sudah dilakukan terus mengarah kepada proses pencapaian pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang, kemudian terkait penyediaan sudah merealisasikan penunjang sistem informasi publik, dari sisi pengukuran sudah berjalan lancar ditunjukkan dengan perangkat dan jaringan yang tersedia sudah mendukung aplikasi teknologi untuk pelayanan informasi publik.

2. Peluang dan tantangan dalam meningkatkan peran GCIO di DISKOMINFO Kota Batam sudah di implementasikan sesuai Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 hanya saja belum optimal dan masih terus mengarah kepada tujuan untuk pendukung Teknologi Informasi.

3. Upaya yang dilakukan GCIO DISKOMINFO Kota Batam untuk meningkatkan peran GCIO yaitu lebih berfokus kepada evaluasi akan regulasi GCIO yang berlaku kedepannya

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, fokus penelitian tertuju pada 1 lokasi.

Arah Masa Depan Penelitian. Peneliti menyadari bahwasannya penelitian ini masih bersifat mendeskripsikan dan menggambarkan terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam agar dapat menambah wawasan yang lebih mutakhir terhadap fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam serta kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam melaksanakan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Lucky. 2023. "Manusia Dan Pola Interaksi Dunia Online."
- Nugroho, Edi. 2015. "Pemodelan Kedudukan Government Chief Information Officer Indonesia | JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi." 2015.
- Harimurti, Agung. 2016. "Urgensi GCIO Untuk Mewujudkan Manajemen Informasi Berbasis Connected Government Di Daerah Istimewa Yogyakarta." 2016.
- Nurunnisa, Adelia. 2023. "ANALISIS PERAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN."
- Pertiwi, Eliyana dan Sigit Purnomo. 2018. "PERAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Studi Deskriptif Di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta)." Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi 2 (1)
- Putranto, Arfiandi, Edi Nugroho, dan Wing Wahyu Winarno. 2015. "GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER: ANALISIS PERAN DI PEMERINTAHAN INDONESIA." SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 3 (1): 3-7
- Simangunsong, Fernandes. 2017. "METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN : TEORI-LEGALISTIK-EMPIRIK-INOVATIF / | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri." 2017.
- Supangkat, Suhono H. 2008. "CIO: Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi Untuk Pertumbuhan Organisasi." Universitas Indonesia Library. ICT Institute. 2008.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D." 2017.
- Kosala, Raymondus. Suhono H. Supangkat, dan Firman Anindra. 2018. "Smart Governance as Smart City Critical Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia)." 2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), October, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ICTSS.2018.8549923>.

Bungin, Burhan. 2020. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rukayat, Yayat. 2017. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu."

Anjani, Diyan. 2023. "Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 59 Tahun 2020." *Jurnal Media Infotama 19 (1)*: 133-40.

Moleong, L. J. 2018. "Metodologi Penelitian Kualitatif." 2018.

Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

